

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di dunia kini berada pada ketidakpastian akibat virus corona *disease* 2019 (Covid-19) yang menyerang saluran pernafasan manusia dan mudah menular pertama kali muncul di Kota Wuhan negara Tiongkok, saat ini sudah menyebar ke 221 negara atau teritori. Maka, 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) memutuskan menjadi Kedaruratan Kesehatan pada Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan juga pada 12 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa *Coronavirus* sebagai pandemi. Virus corona tersebut menarik perhatian masyarakat sejak pemerintah mengumumkan bahwasannya ada warga Indonesia yang sudah terjangkit. Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang besar menjadikan Indonesia adalah negara yang rentan penyebaran virus corona, beberapa negara-negara atau teritori mengambil kebijakan *lockdown* untuk membatasi kegiatan masyarakatnya namun di Indonesia mengambil kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar (PSBB) berlaku pada 17 April 2020. Seiring berjalannya waktu muncul *variant* baru virus corona yakni *delta, beta, alpha, omicron* yang penularan atau penyebarannya dua kali lebih cepat.

Sehingga pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala besar dari level 1-4 pada 11 Januari 2021 di pulau Jawa dan pulau Bali yang setiap saat dipantau perkembangannya dan selanjutnya ke daerah luar pulau Jawa dan pulau Bali, memberi kecemasan bagi pelaku usaha di Indonesia. Covid-19 perlahan-lahan akan membawa Indonesia pada potensi dalam penurunan ekonomi beberapa sektor strategis yang akan memicu

kemunduran ekonomi secara nasional, turunnya pendapatan negara baik dari sektor pajak maupun yang lainnya, dan penambahan belanja pemerintah dan pengeluaran, serta mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Pengaruh yang muncul dari segi perekonomian Indonesia benar-benar terlihat. Berdasarkan (Modjo, 2020) Indonesia suatu negara yang terbuka, ekonomi Indonesia tidak tahan gejolak ekonomi dunia disebabkan pandemi Covid-19. Pelbagai badan perekonomian internasional seperti *World Bank* yang diproyeksikan pandemi akan menurunkan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2021 berkisar antara 4,4%-5,3%. Untuk memecahkan masalah itu, pemerintah melakukan langkah membuat kebijakan terkait beberapa hal yang terimbas adanya pandemi seperti halnya bidang kesehatan, Perlindungan sosial atau kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan perekonomian.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah (Kota/Kabupaten) sudah mempersiapkan beberapa program dan kebijaksanaan untuk memulihkan dampak yang terjadi karena pandemik tersebut. Efek yang timbul akibat pandemi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan guna menstabilkan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian atau stabilitas sistem keuangan (peraturan.bpk.go.id, 2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 diatur mengenai kebijakan dalam keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi atau membuat instabilitas keuangan Indonesia. Kebijakan pada keuangan negara terdiri dari kebijakan penerimaan negara serta kebijakan sektor pajak, kebijakan pengeluaran negara termasuk kebijaksanaan dalam keuangan di daerah, serta kebijaksanaan pembiayaan. Program stabilitas keuangan negara terdiri atas kebijakan pada penanggulangan masalah pada badan keuangan yang mengancam ekonomi bangsa atau kestabilan rencana anggaran (kemenkeu.go.id, 2020).

Ada lima maksud atau tujuan kebijakan pemerintah berdasarkan pada Perppu Nomer 1 Tahun 2020. Kesatu, pemerintah menetapkan penambahan pembiayaan dan pengeluaran belanja APBN untuk menangani pandemi. Kedua, anggaran sektor kesehatan menjadi prioritas untuk memproteksi para tenaga medis dalam menjalankan tugas dan untuk menaikkan kapasitas rumah sakit rujukan dan juga untuk intensif para tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter dan perawat. Serta untuk menyantuni para tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar, juga untuk menangani masalah bidang kesehatan yang lain sebagainya. Ketiga, anggaran kesejahteraan akan perlindungan sosial diutamakan untuk keluarga penerima manfaat. Keempat, untuk sektor non-fiskal beberapa kebijakan yang dilakukan seperti halnya penyederhanaan larangan terbatas bagi ekspor, penyederhanaan larangan terbatas bagi impor, dan mempercepat proses-proses pelayanan ekspor dan impor lewat *national logistic ecosystem*. Kelima, bantuan stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga pelaku usaha, yang diprioritaskan

bagi para pekerja disektor industri pengolahan.

Pandemi pada tataran perekonomian global membawa dampak terhadap industri ekonomi domestik begitu juga pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada (Pakpahan, 2020) dikatakan bahwa pandemi berdampak pada resiko krisis perekonomian yang luas diliat dari daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat yang turun, produksi yang dikurangi bahkan terhenti di banyak negara, pasar saham yang fluktuatif sehingga menuju ketidakpastian. Presiden Joko Widodo dalam melihat situasi terkini sudah menyiapkan kebijakan bagi keberlangsungan UMKM seperti yang dimuat setkab.go.id :

“setkab.go.id, DKI Jakarta–Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Program Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui konferensi video.Rabu (15/4). Presiden memberikan empat arahan dalam rangka mitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM, yakni: Pertama, mempercepat dan dipercepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Menurut Presiden, mekanisme bantuan untuk kredit UMKM baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. “Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat, jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Semua saya minta semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya dan sehingga kita nantinya bisa memutuskan,” imbuh Presiden. Kedua, dalam masa pandemi ini Presiden juga minta disiapkan sebuah skema baru dalam pembiayaan terutama yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan modal kerja. “Dan pengajuannya yang lebih mudah dengan jangkauan, terutama untuk daerah-daerah yang terdampak,” kata Presiden. Ketiga, untuk usaha mikro dan ultra mikro, Presiden meminta juga dimasukan dalam skema bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan paket sembako. Keempat, Presiden minta untuk UMKM diberikan peluang terus untuk berproduksi. “Terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas Presiden di akhir pengantar.

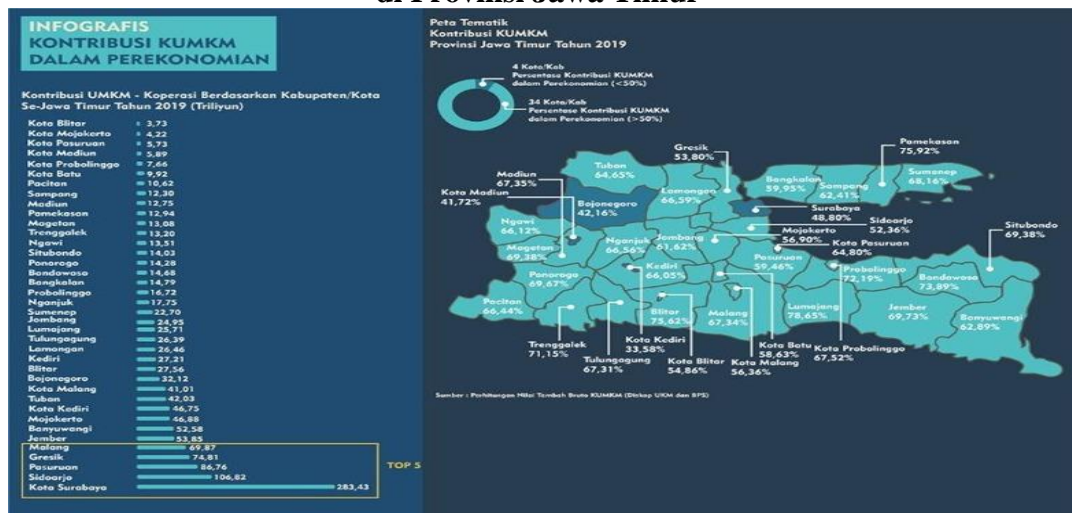
Sumber: (<https://setkab.go.id/4-arahan-presiden-dalam-mitigasi-dampak-covid-19-pada-umkm/>) diakses Sabtu 18 September 2021, 21:00 WIB)

Berdasarkan pada berita tersebut, diketahui bahwasannya Presiden Jokowi fokus saat keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi ini terjadi masalah di bidang ekonomi dan membuat guncangan ekonomi di tengah masyarakat. Selaras informasi Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yakni 61,41% sehingga mengindikasikan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan dapat mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Maka pemerintah juga mencanangkan 5 (lima) skema guna perlindungan serta pemulihan perekonomian untuk bidang usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) supaya semua bisa bertahan dalam pandemi Covid-19, skema tersebut secara umum adalah Pertama, Usaha kecil dan menengah kelompok rentan dan miskin menjadi penerima bansos. Kedua, stimulus pajak untuk UMKM dengan keuntungan dibawah 4,8 Miliar/tahun. Ketiga, Restrukturisasi kredit dan relaksai untuk UMKM. Keempat, Peningkatan pendanaan modal kerja 23 juta UMKM yang belum berhubungan dengan lembaga pembiayaan perbankan. Kelima, Kementerian, BUMN dan Pemerintah daerah sebagai penunjang UMKM.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM berjumlah 64 juta-an ada di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. Walaupun demikian, pertumbuhan UMKM Indonesia masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan turunnya daya saing dengan produk-produk impor dan juga dengan situasi pandemi saat ini yang berdampak pada perkembangan UMKM. Pengembangan UMKM sebagai penguat ketahanan ekonomi dalam rangka menstimulasi, daya saing, kesempatan usaha. Oleh karena

itu, meninjau bahwa UMKM ini sangat mempengaruhi pada perekonomian, Seiring dengan perkembangan UMKM di Jawa Timur, pada tahun 2021, UMKM mencapai hingga 3.447.520 unit usaha yang tersebar di Jawa Timur berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur kontribusi UMKM dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2
Infografis Kontribusi UMKM dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, (2021)

Berdasarkan gambar di atas, posisi tertinggi pada Ibukota Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan perolehan 283,43 triliun. Selanjutnya, Sidoarjo ada pada tingkat kedua dengan memperoleh 106,82 triliun. Disusul oleh Pasuruan yang perolehan 86,76 triliun. Kemudian, ada Gresik yang meraih total 74,81 triliun. Walaupun demikian, pertumbuhan UMKM Indonesia masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan turunnya daya saing dengan produk-produk impor dan juga dengan situasi pandemi saat ini yang berdampak pada perkembangan UMKM. Maka, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mendukung UMKM dibuktikan dengan membuat regulasi. Pemerintah pusat

(Kementerian) dan Pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) memberi perhatian terhadap para UMKM dalam masa pandemi yang sulit ini. Lebih jauh tentang yang akan diteliti penulis lebih dalam yakni bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan memulihkan dampak pandemi Covid-19 untuk usaha mikro di Kota Surabaya. Hal itu berdasarkan jumlah UMKM yang keberadaannya dalam kondisi sulit akibat pandemi di Kota Surabaya sebagaimana pada berita yang dilansir oleh media JawaPos.com:

JawaPos.com–Surabaya. Pedagang busana muslim di Dukuh Pakis Anisa Zairina berharap PPKM tidak dilanjutkan. Pasalnya, penerapan PPKM memperburuk kinerja penjualannya selama sebulan terakhir. "Tidak ada yang beli baju baru karena orang tidak boleh sering keluar rumah," ungkapnya.

Penurunan penjualan busana muslim sudah terjadi sejak tahun lalu. Omzet turun 50 persen sepanjang 2020. Selama semester I 2021, penjualan hanya ditopang pada musim Lebaran. Ketika itu volume penjualan Anisa naik 50 persen dengan omzet naik 30 persen. Penjualan kembali menurun seusai Lebaran. "Terus habis itu ada PPKM. Tambah menurun lagi," cetus Anisa.

Siska Utami, distributor makanan ringan di Wiyung, juga berharap PPKM berakhir. Selama PPKM diterapkan, omzetnya turun 30 persen. Hal tersebut dipengaruhi aktivitas produksi yang menurun dari produsen serta suplai yang menurun dari distributor besar. "Jadinya, distributor kecil seperti saya ini juga turun jualannya," ucap dia.

Selama ini makanan ringan yang dijualnya dititipkan di warung dan minimarket. Penjualan yang lebih banyak menurunnya berasal dari titipan yang ada di warung, terutama warung makan. "Pada PPKM level 4 makannya dibatasi cuma 20 menit. Jadi jarang orang makan keripik-keripik," ujarnya.

Sumber:(<https://www.jawapos.com/surabaya/02/08/2021/jerit-para-pelaku-umkm-surabaya-selama-ppkm/>) diakses Minggu 19 September 2021, 12:30 WIB)

Berdasarkan berita tersebut, diketahui beberapa UMKM di Kota Surabaya mengalami penurunan omzet penjualan yang signifikan. Para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal yang banyak menjadi tidak lagi memproduksi seperti normal karena permintaan konsumen menurun signifikan. Maka, pemerintah daerah

dibutuhkan perihal ini dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya untuk menyikapi persoalan UMKM yang jumlahnya banyak di Kota Surabaya.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Surabaya
Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah UMKM
2015	27.926
2016	28.391
2017	28.759
2018	29.507
2019	32.301
2020	40.000

Sumber: Dinkopum Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui UMKM di Kota Surabaya selalu meningkat, Dari 2015 jumlah UMKM sebanyak 27.926 dan mengalami peningkatan pada 2016 yaitu 28.391. Selanjutnya pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah UMKM juga menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 28.759. kemudian tahun 2018 bertambah lagi menjadi 29.507 sampai pada tahun 2020 dan juga 2021 tren peningkatan signifikan jumlah UMKM terlihat sebagaimana dalam media JawaPos.com:

“JawaPos.com–Surabaya. Kepala Dinkopum Surabaya Widodo Suryantoro mencatat selama 2020, jumlah UMKM meningkat hingga 2020 mencapai angka 40 ribu. Kamis (25/2)

Widodo menjelaskan, kenaikan UMKM berkisar di dua bidang, yakni jasa dan kuliner. Menurut dia, warga mampu memanfaatkan peluang selama pandemi.

”Warga menghindari keluar rumah. Jadi jasa dan kuliner ini difokuskan untuk pelayanan langsung ke rumah,” terang Widodo.

Dinkopum mencatat beberapa jenis usaha mulai bermunculan di Kota Surabaya. Misalnya, depot, warung, servis motor, hingga salon.

Sumber:(<https://www.jawapos.com/surabaya/25/02/2021/selama-pandemi-umkm-di-surabaya-meningkat-hingga-40-ribu-unit/>) diakses Minggu 19 September 2021)

Berdasarkan pada berita diatas, meskipun kondisi pandemi tahun 2020 dan 2021 ini jumlah UMKM masih menunjukkan kenaikan, dari kenaikan tersebut menjadi tantangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya mempersiapkan beberapa tindakan supaya UMKM tetap mampu berkembang dan bertahan. Dengan jumlah UMKM di Kota Surabaya yang banyak mengakibatkan masyarakat Surabaya ikut terdampak secara ekonomi selama pandemi saat ini, karena roda ekonomi tidak berjalan lancar imbas pembatasan sosial yang diterapkan dan dampak lain yang muncul oleh karena pandemi. Hal tersebut sebagaimana diberitakan media Sindonews.com:

“SURABAYA-Dampak ekonomi dari pandemi, sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pantai Kenjeran, Bulak Kota Surabaya. Sejak ditutupnya sejumlah tempat wisata seperti pantai ria kenjeran, taman suroboyo untuk menghindari penyebaran virus Corona, perekonomian masyarakat menurun drastis. Salah satu nelayan Pantai Kenjeran, Mustakim mengungkapkan, sejak ditutupnya sejumlah wahana wisata dirinya tidak bekerja lantaran tidak ada wisatawan datang.

Perahu yang biasa ia disewakanpun terpaksa diparkir di bibir pantai. Bahkan ratusan nelayan kenjeran juga memilih tidak melaut karena ikan hasil tangkapan yang biasa diolah menjadi oleh-oleh tidak laku. "Ini kan soalnya penjualan ikan gak laku, ya akhirnya kita stop," katanya.

Saat ini Mustakim dan sejumlah pedagang lainnya hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah. "Kita berharap ada bantuan dari pemerintah. Karena buat makan aja susah." Ucapnya.

Sementara, Masruroh, penjual ikan asap di Pantai Kenjeran, mengaku permintaan ikan asap menurun 50 persen, sehingga produksi ikan asap terpaksa dikurangi.

Sumber:(<https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/27703/serangan-corona-bikin-nelayan-di-pantai-kenjeran-menjerit>) diakses Senin 20 September 2021, 06.00 WIB)

Berdasarkan pemberitaan diatas, bisa diketahui selama pandemi di tahun ini mengakibatkan dampak negatif bagi UMKM di Kecamatan Bulak yang merugi dan juga nelayan ikut terdampak karena hasil tangkapan ikannya tidak laku karena turunnya pembeli akibat pandemi, para pelaku UMKM berharap ada bantuan yang

setidaknya bisa meringankan kesulitan mereka. Minimnya modal yang dimiliki beberapa UMKM di Kecamatan Bulak menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga hasil keuntungan yang didapat pun tidak optimal, dari pra-riset yang saya lakukan beberapa UMKM juga kurang mengerti pemasaran digital dan kurangnya inovasi produk serta permasalahan fasilitas produksi khususnya pelaku usaha ikan asin yang menjemur ikan di tepi jalan karena belum ada fasilitas.

Berdasarkan uraian data sebelumnya, Kecamatan Bulak menjadi kecamatan yang terdampak pandemi di wilayah Surabaya. Kecamatan Bulak mempunyai potensi ekonomi dalam sumber daya alam, yakni produk olahan laut, pertanian dan produk daur ulang, serta dapat menjadi objek wisata kuliner olahan hasil laut yang dapat berkembang. Sejak ditutupnya sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah ini seperti Pantai Ria Kenjeran, Taman Suroboyo, dan Taman Bulak membuat pendapatan mereka menjadi menurun karena wisatawan (pembeli) yang datang menurun bahkan tidak ada dan juga jumlah usaha mikro di Kecamatan Bulak yang cukup besar yaitu sebanyak 2.086 pelaku usaha mikro. Pada waktu terjadinya pandemi Covid-19 ini para usaha mikro menginginkan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan usaha mereka yang diambang kebangkrutan, sehingga menangani persoalan tersebut diperlukan peran pemerintah daerah. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu, pemulihan dampak pandemi bagi usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berperan menjadi fasilitator untuk program dari pemerintah pusat. sebagaimana yang dipaparkan menurut (Diva, 2009) dikutip dalam (Ermalia & M'ruf, 2016) peran pada pengembangan UMKM,

peranan pemerintah efisien serta efektif ditunjukkan menjadi katalisator, fasilitator, dan regulator. Didasarkan data yang sudah diuraikan penulis, peneliti beranggapan perlu peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam perihal ini. Oleh sebab itu peneliti menyiapkan judul **“Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya dalam Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latarbelakang yang diuraikan sebelumnya, sehingga rumusan masalah pada penelitian berikut ini: Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Surabaya dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis sudah diajarkan selama di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan mengenai peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya untuk memulihkan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro Kecamatan Bulak Kota Surabaya serta dapat mempraktikkan teori dan ilmu yang diterima pada masa perkuliahan di program studi Administrasi Publik.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang pendidikan serta bahan masukan untuk peneliti lain pada saat menjalankan penelitian serupa di waktu mendatang, dan juga menjadi pedoman akademik untuk pengembangan pengetahuan.

c. Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pimpinan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya untuk menjalankan peran guna membantu pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.